





## MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

# DPRD KOTA YOGYAKARTA

KEMBALI BENTUK PANSUS PEMBAHAS RAPERDA

## Beban Legislasi Anggota Dewan Terpilih Lebih Ringan



KR-istmewa

Anggota DPRD Kota Yogyakarta mengikuti sidang paripurna.



KR-istmewa

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta menandatangani surat keputusan.



KR-istmewa

Anggota DPRD Kota Yogyakarta mengikuti sidang paripurna.

**YOGYA (KR)** - Beban legislasi anggota DPRD Kota Yogyakarta terpilih hasil Pemilu 2024 dipastikan akan lebih ringan. Terutama setelah resmi dilantik sampai dengan kinerja akhir tahun ini. Hal ini lebih dari separeuh Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini sudah berhasil diselesaikan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta bahkan kembali membentuk panitia khusus (pansus) di sisa akhir masa jabatan dewan 2019-2024.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menjelaskan total ada tiga pansus yang berhasil ditetapkan pada Senin (3/6) kemarin. Pihaknya berharap, sebelum pelantikan anggota dewan yang baru seluruh kinerja pansus tersebut sudah bisa diselesaikan. "Supaya beban legislasi bagi anggota dewan yang baru nanti bisa lebih ringan mengingat sisa waktu efektif sampai akhir tahun juga lebih terbatas," jelasnya, Selasa (4/6).

Ketiga pansus yang dibentuk dalam sidang paripurna kemarin lusa, masing-masing akan membahas raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Dua raperda di awal merupakan produk hukum inisiatif eksekutif dan raperda terakhir hasil usulan dewan yakni dari Komisi A.

Widodo menambahkan, anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029 sesuai rencana akan dilantik pada 12 Agustus 2024. Sehingga sisa waktu efektif untuk melakukan pembahasan tiga produk hukum kali ini ialah dua setengah bulan. Pihaknya sangat optimis waktu yang tersedia mampu dilakukan secara optimal untuk melakukan pembahasan. "Semua sudah sepakat pansus yang dibentuk kemarin harus sudah selesai sebelum pelantikan dewan baru. Supaya tidak ada pekerjaan tertunda yang dilimpahkan," tandasnya.

Total Propemperda 2024 mencapai 14 produk hukum. Masing-masing terdiri dari sembilan raperda yang diajukan oleh eksekutif, tiga raperda urusan wajib, dan dua raperda inisiatif dari kalangan dewan. Jumlah target produk hukum itu pun sama dengan tahun 2023 lalu. Sesuai ketentuan, ketika Propemperda bisa dituntaskan 100 persen maka untuk target tahun depan bisa ditambah hingga 25 persen. Dengan begitu tahun ini DPRD Kota Yogyakarta sebetulnya bisa membahas hingga 17 produk hukum. Akan tetapi Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta tetap menargetkan 14 Propemperda lantaran mempertimbangkan berbagai aspek.

Salah satu aspeknya ialah menyangkut alat kelengkapan dewan yang akan menjalankan fungsi legislasi. Pasalnya, setiap pergantian periodisasi dewan maka dibutuhkan waktu untuk membentuk alat kelengkapan. Dalam proses pembentukannya kerap diwarnai dengan dinamika politik sehingga perlu ada antisipasi. "Misal nanti dilantik 12 Agustus 2024, tidak bisa langsung melakukan pembahasan raperda sebelum alat kelengkapan terbentuk. Semoga nanti tidak sampai satu bulan semua alat kelengkapan sudah bisa ditetapkan," ungkapnya.

Sesuai pengalaman, setiap produk hukum setidaknya membutuhkan waktu paling lama sampai tiga bulan pembahasan oleh tim pansus. Ketika anggota dewan baru sudah berhasil menempati pos alat kelengkapan pada akhir Agustus maka tersisa empat bulan kinerja legislasi yang dapat dijalankan. Sisa Propemperda 2024 pada akhir tahun ini pun hanya empat produk hukum. Dengan begitu kinerja legislasi sampai akhir tahun akan lebih ringan.

Di samping itu, capaian kinerja legislasi pada tahun ini juga menjadi evaluasi dan pertimbangan untuk menetapkan Propemperda tahun 2025. Target pembahasan produk hukum pada tahun depan harus sudah ditetapkan sebelum RAPBD 2025 diketok. Oleh karena itu, ketika Propemperda 2024 sudah bisa dituntaskan 100 persen maka target di tahun depan bisa ditambah hingga 17 produk atau minimal sama dengan tahun ini. Semakin banyak produk hukum yang dapat diselesaikan maka kepentingan pembangunan di Kota Yogyakarta juga akan semakin terlegitimasi lantaran setiap aspeknya ada payung hukum yang menaungi.

Sesuai ketugasannya dalam menjalankan fungsi legislasi, Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen untuk bisa memperbanyak produk hukum yang ditetapkan. Baik berupa pencabutan perda yang sudah usang atau tidak sesuai aturan di atasnya, penyesuaian aturan pada kondisi masa kini, maupun membentuk produk hukum baru yang mendesak sesuai kebutuhan. "Adanya undang-undang baru yang berkaitan dengan tatanan pemerintahan maupun sistem di masyarakat, tentunya perlu ditindaklanjuti juga dengan perda. Ini yang kami sesuaikan dengan mendasarkan skala prioritas," katanya. **(Dhi-f)**



KR-istmewa

Pj-Walikota (kiri) menghadiri sidang paripurna.



KR-istmewa

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta membacakan penetapan pansus.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005